

KOMNAS PEREMPUAN  
LAPORAN TAHUNAN 2007

Membangun Tim Kerja, Meneruskan Estafet Perjuangan

## **LATAR BELAKANG**

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya: Komnas Perempuan) adalah mekanisme nasional untuk penegakkan Hak Asasi Manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan lahir dari rahim pergulatan gerakan perempuan Indonesia dan merupakan jawaban pemerintah RI terhadap tuntutan gerakan perempuan agar negara bertanggungjawab terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama konflik dan kerusuhan Mei 1998. Presiden Habibie meresmikan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181 tahun 1998, yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 65 tahun 2005.

Sesuai Perpres Nomor 65 tahun 2005 tujuan berdirinya Komnas Perempuan adalah untuk:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakkan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia.
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Perpres Nomor 65 tahun 2005 memberi Komnas Perempuan mandat untuk:

1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrument internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan.
3. Melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan.
4. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah maupun organisasi masyarakat dalam rangka mendorong hukum dan kebijakan yang mendukung pencegahan, penanggulangan dan perlindungan HAM perempuan; dan
5. Mengembangkan kerjasama regional dan internasional

## **KOMISIONER, KEPEMIMPINAN DAN STRUKTUR BARU PERIODE 2007-2009**

Komisioner Komnas Perempuan periode 2007-2009 telah terpilih pada bulan Desember 2006 dan mulai bekerja sejak Januari 2007. Komisioner periode ini terdiri dari 13 orang dengan berbagai latar belakang dan asal daerah yang berbeda. Mereka adalah: Abd.A'la (teolog, Surabaya), Arimbi Heroepoetri (aktivis lingkungan hidup, Jakarta), Azriana

(pengacara, Aceh), Deliana Sayuti Ismudjoko (pensiunan hakim, Jakarta), Husein Muhammad (tokoh agama, Cirebon), Kamala Chandrakirana (sosiolog, Jakarta), Neng Dara Affiah (teolog, Banten), Ninik Rahayu (pengacara, Jember), Pengasih Gaut (pensiunan perwira tinggi polisi, Jakarta), Sjamsiah Achmad (aktivis HAM perempuan, Jakarta), Sri Wiyanti Eddyono (pengacara, Yogyakarta), Sylvana Maria Apituley (teolog, Jakarta), Vien Suseno (aktivis perempuan, Jakarta).

Pemimpin Komnas Perempuan terpilih untuk periode 2007-2009 adalah: Kamala Chandrakirana (Ketua), Ninik Rahayu (Wakil Ketua I) dan Sylvana Apituley (Wakil Ketua II). Sekretaris Jenderal adalah Diana Iriani Jusuf, yang mengundurkan diri pada Oktober 2007 dan diganti sementara oleh Vien Suseno sebagai Pejabat Sekjen.

Pada awal masa kerjanya, Dewan Paripurna periode baru membuat beberapa keputusan strategis, antara lain, membentuk 5 subkomisi khusus, masing-masing:

Subkomisi:

1. Pemantauan
2. Reformasi Hukum & Kebijakan
3. Pengembangan sistem pemulihan bg korban
4. Penelitian, Pengembangan & Pendidikan
5. Partisipasi Masyarakat

Ketua:

- Arimbi Heroepoetri  
Deliana Ismudjoko  
Azriana  
Neng Dara Affiah  
Pengasih Gaut

Serta mengesahkan tujuan strategis Komnas Perempuan, yaitu:

- a. Meluas dan menguatnya penyikapan oleh masyarakat, khususnya kelompok-kelompok sosial masyarakat yang berpengaruh pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan, dan pada upaya menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.
- b. Terbangunnya mekanisme komunikasi dan kerjasama sinergis lintas institusi yang efektif dan berkelanjutan antar kekuatan-kekuatan masyarakat dan negara untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.
- c. Kokohnya Komnas Perempuan sebagai komisi Nasional yang Independent, Efektif, Terpercaya dan Akuntabel

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, telah ditetapkan program prioritas Komnas Perempuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya upaya negara untuk memenuhi tanggung jawabnya atas penegakan hak-hak asasi perempuan.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak-hak korban
3. Kokohnya kelembagaan Komnas Perempuan

## **KERJA DAN CAPAIAN DI TAHUN PERTAMA YANG PENUH TANTANGAN**

### **Berkarya di Masa Transisi**

Dewan Paripurna Komnas Perempuan periode 2007-2009 berkarya pada masa transisi dari orang-orang lama kepada orang-orang baru. Para komisioner lama yang sebagian besar pendiri (*founding mothers*) Komnas Perempuan harus mengakhiri masa baktinya dan diganti dengan orang-orang baru. Hanya tiga (3) dari delapan belas (18) komisioner lama melanjutkan masa baktinya bersama sepuluh (10) orang komisioner baru hingga tahun 2009 nanti. Seperti umumnya masa transisi, tahun 2007 merupakan tahun kerja yang tidak selalu mudah dijalani. Selain konteks sosial, ekonomi, budaya dan politik Indonesia yang terus bergerak secara dinamis, pergulatan internal kelembagaan Komnas Perempuan cukup mempengaruhi kerja-kerja Komnas Perempuan. Perubahan struktur, penyempurnaan mekanisme kerja, proses membangun relasi dan budaya kerja antara anggota Komnas Perempuan (komisioner maupun badan pekerja), semua itu berlangsung bersamaan waktunya dengan pengembangan dan pelaksanaan program-program kerja Komnas Perempuan. Itulah sebabnya, dapat dikatakan bahwa tahun 2007 adalah tahun pertama yang penuh tantangan namun dapat dilalui dengan selamat.

### **Enam Isu Utama, Program & Capaian (?)**

Mengacu pada mandat Perpres Nomor 65 th. 2005 maupun Rencana Strategis Komnas Perempuan 2007-2009, kelima subkomisi serta perangkat kelembagaan lainnya (dhi. Kesekjenan, Dewan Kelembagaan, Gugus Kerja dan Panitia Ad Hoc) telah melaksanakan program & kegiatan yang mencakup enam (6) area atau isu utama, yaitu:

1. Pemantauan & pelaporan HAM perempuan.
2. Penguatan penegak hukum & mekanisme HAM nasional
3. Negara, agama dan HAM perempuan
4. Mekanisme HAM internasional
5. Peningkatan partisipasi masyarakat
6. Kelembagaan

### **Pemantauan dan pelaporan HAM perempuan**

1. **Catatan Tahunan (CATAHU) tentang Kekerasan terhadap Perempuan.** CATAHU tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) adalah upaya Komnas Perempuan untuk mengumpulkan dan menganalisa data berbagai lembaga mitra yang menangani kasus KTP demi menghasilkan gambaran utuh dan trend KTP serta penanganannya di tingkat nasional. CATAHU tentang Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) tahun 2006 telah dipublikasikan oleh Komnas Perempuan pada tanggal 7 Maret 2007. CATAHU 2006 secara khusus menyoroti kasus KTP yang ditangani oleh lembaga mitra menurut wilayah dan masalah Perempuan Pembela HAM. Dengan tujuan, agar publik: mendapat gambaran utuh tentang besaran kasus KTP yang ditangani menurut wilayah; serta memberi perhatian khusus terhadap fenomena perempuan pembela HAM.
2. **Masukan untuk pidato kenegaraan Presiden RI kepada DPR RI.** Komnas Perempuan telah diminta untuk memberi masukan sebagai bahan pidato kenegaraan Presiden RI kepada DPR RI pada awal tahun 2007. Dalam masukannya Komnas Perempuan menyampaikan beberapa isu kritis, meliputi: terobosan kebijakan tentang layanan dan penanganan perempuan korban kekerasan yang telah dihasilkan pemerintah di tingkat nasional maupun daerah; peta dan trend kekerasan terhadap

- perempuan di Indonesia; pengakuan dan apresiasi masyarakat internasional terhadap inisiatif penegakkan HAM perempuan korban kekerasan di Indonesia; serta upaya penguatan dukungan masyarakat bagi pemenuhan HAM perempuan korban kekerasan. Rekomendasi utama Komnas Perempuan antara lain: berjalannya harmonisasi produk hukum nasional/daerah dengan konstitusi dan perjanjian internasional tentang penegakkan HAM; serta terlaksananya tanggungjawab negara dalam upaya penegakkan hak perempuan korban kekerasan, khususnya korban kekerasan seksual.
3. **Pemantauan pelanggaran HAM perempuan selama konflik bersenjata di Poso periode 1998-2005.** Berdasarkan permintaan resmi berbagai pihak, baik itu komunitas korban, pendamping korban, organisasi perempuan maupun lembaga advokasi HAM di Sulawesi Tengah, pada medio November 2005 Komnas Perempuan memutuskan untuk melakukan pemantauan pelanggaran HAM perempuan di Sulawesi Tengah. Tujuan pemantauan tersebut adalah: mencari dan mendokumentasikan fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan lainnya yang terjadi dalam konflik Poso sejak Desember 1998 hingga Desember 2005; serta mendorong pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM perempuan tersebut dan mendukung upaya pemulihan korban serta komunitas secara peka jender. Pemantauan dilaksanakan oleh tim terdiri dari seorang Pelapor Khusus, Gugus Kerja Poso dan Tim Dokumentasi. Tim telah mengakhiri tugasnya pada bulan November 2007 dan menghasilkan laporan tertulis yang akan dipublikasikan pada tahun 2008 ini oleh Komnas Perempuan.
  4. **Pemantauan pelanggaran HAM perempuan korban konflik politik 1965.** Pada tanggal 29 Mei 2006 Komnas Perempuan menerima pengaduan sekelompok perempuan korban peristiwa 1965. Para perempuan korban menceritakan pengalaman kekerasan di masa lalu serta diskriminasi yang masih terus mereka dan keluarganya alami sampai saat ini. Sebagai respons terhadap pengaduan para perempuan korban yang rata-rata telah lanjut usia tersebut, Komnas Perempuan memutuskan untuk melakukan sejumlah tindakan, yaitu: berupaya memahami dan menganalisa pengalaman perempuan korban 1965; memfasilitasi dialog dengan pengalaman korban dengan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat; membuat sebuah laporan resmi tentang temuan-temuan dari proses sebelumnya serta rekomendasi kepada pemerintah dan presiden. Laporan tertulis lengkap mengenai seluruh langkah Komnas Perempuan ini sudah diluncurkan pada akhir tahun 2007 yang lalu.
  5. **Pemantauan kondisi HAM perempuan korban penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia.** Komnas Perempuan menerima dua kali pengaduan warga Ahmadiyah yang menjadi korban penyerangan fisik di Cianjur dan NTB pada medio September 2005 dan Februari/Maret 2006. Sebagai respons terhadap pengaduan tersebut, Komnas Perempuan mengirim tim pemantau dengan fokus pemantauan: kondisi perempuan Jamaah Ahmadiyah terkait isu kebebasan beragama, kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi, akses perempuan terhadap pemulihan dan tanggungjawab negara. Temuan, analisis, simpulan dan rekomendasi tim Komnas Perempuan telah diselesaikan dan dilaporkan kepada Dewan Paripurna pada Oktober 2007.
  6. **Pemantauan pelanggaran HAM perempuan dalam konflik sumber daya alam di Alastlogo, Pasuruan Jawa Timur.** Dalam rangka penyikapan kasus konflik sumber daya alam di Alastlogo, Rapat Paripurna Komnas Perempuan Juni 2007

- memutuskan untuk melakukan pemantauan. Fokus pemantauan adalah: menggali persoalan perempuan dalam konteks akses perempuan terhadap kehidupan di tengah sengketa yang terjadi; serta penanganan korban pasca insiden penembakan oleh aparat marinir. Pemantauan dilaksanakan oleh sebuah tim dibawah koordinasi subkom Pemantauan. Hasil temuan, analisis, kesimpulan dan rekomendasi tim Komnas Perempuan dalam bentuk tertulis telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang/terkait (**CEKI**).
- 7. Pemantauan pelanggaran HAM perempuan korban lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur.** Komnas Perempuan merespons pengaduan korban lumpur Lapindo dengan mengirim tim pemantau ke lokasi pengungsian Pasar Baru Porong pada bulan September 2007. Proses pemantauan melibatkan baik korban maupun pihak terkait, terutama Pemda setempat. Hasil pemantauan Tim Komnas Perempuan merupakan laporan temuan dan analisis Komnas Perempuan tentang kondisi HAM perempuan pasca bencana/di pengungsian.

### **Penguatan penegak hukum & mekanisme HAM nasional**

- 1. Peningkatan pengetahuan hakim pengadilan agama tentang KDRT dan UU PKDRT.** Dari Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan, Komnas Perempuan melihat bahwa Pengadilan Agama menjadi salah satu alternatif yang dicari perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk mencari keadilan. Karena itu, pemahaman para Hakim Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, akan sangat membantu para perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan putusan yang adil atas kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialaminya. Inilah latarbelakang subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan dalam melaksanakan program peningkatan pengetahuan hakim pengadilan agama tentang KDRT dan UU PKDRT. Untuk itu subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan menyelenggarakan seminar dan lokakarya bagi para Hakim Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta menyusun buku referensi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga bagi para Hakim Pengadilan Agama.
- 2. Kerjasama dengan Derap Warasari, LBH APIK dan *Convention Watch* untuk penguatan penegak hukum dalam penanganan kasus Kekerasan terhadap perempuan.** Pada tahun 2007, subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan bersama LBH APIK Jakarta (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Jakarta), DERAP Warasari, dan Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, melaksanakan program lanjutan Penguatan Penegak Hukum dalam penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Program yang sejatinya adalah lanjutan dari program yang sudah dikerjakan sejak tahun 2003 ini bertujuan untuk menciptakan sistem dan mekanisme yang kondusif bagi penegakan hukum dan keadilan bagi perempuan, dengan mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan gender. Instansi atau pihak yang terkait dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan gender adalah relawan pendamping, psikolog, advokat, penyedia layanan Rumah Sakit, penyedia layanan Rumah Aman, Kepolisian, Kejaksaan, Panitera, Hakim, Rumah Tahanan, dan Lembaga Masyarakat. Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan gender ini kembali disosialisasikan oleh Komnas Perempuan sekaligus

- dilakukan upaya pengintegrasian konsep tersebut ke dalam Rancangan Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. **Penerbitan panduan hukum berperspektif feminis bekerjasama dengan APWLD dan asosiasi pengacara.** Dalam kerjasama dengan APWLD dan asosiasi pengacara (?), Komnas Perempuan, melalui subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan, berinisiatif menyusun Materi Pendidikan Advokat tentang Feminist Legal Theory and Practice (Teori dan Praktek Hukum yang berkeadilan gender), serta menerbitkannya dalam bentuk buku panduan hukum berperspektif feminis.
  4. **Kesepakatan pengembangan mekanisme kerjasama yang komprehensif dengan Komnas HAM.** Relasi dan kerjasama Komnas Perempuan dengan Komnas HAM selama ini belum memiliki bentuk dan pola yang tetap dan berkelanjutan. Mulai akhir tahun 2007 Komnas Perempuan dan Komnas HAM sama-sama berinisiatif untuk memulai, dan berkomitmen untuk, membangun hubungan kerjasama yang lebih terencana, menetap dan berkelanjutan. Pada sidang Paripurna Desember 2007 tiga orang komisioner Komnas Perempuan dipilih menjadi tim pelaksana kerjasama tersebut. Kerjasama ini akan sangat besar manfaatnya dalam memperkuat pelaksanaan mandat kedua lembaga, baik menyangkut masalah substansial maupun masalah manajemen.

### **Negara, Agama dan HAM perempuan**

1. **Dialog teologis tentang makna keadilan bagi perempuan korban kekerasan.** Dari hasil kerja Komnas Perempuan maupun mitra Komnas Perempuan di beberapa wilayah di Indonesia ditemukan kenyataan sulitnya perempuan korban mengakses keadilan baik di tataran hukum maupun tataran budaya (di dalamnya termasuk agama). Secara khusus, karakter dan mekanisme penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ruang budaya (agama) tidak berpihak kepada perempuan korban, bahkan cenderung me-reviktimisasi mereka. Berdasarkan temuan-temuan yang sangat signifikan ini, subkomisi Litbang & Pendidikan Komnas Perempuan berinisiatif mengembangkan program dialog teologis bersama tokoh/lembaga agama-agama tentang masalah tersebut. Tujuannya, antara lain untuk membangun konsep bersama tentang keadilan bagi perempuan korban; mengidentifikasi peluang pemenuhan keadilan bagi perempuan korban dalam komunitas agama dan budaya; serta membangun konsep dan mekanisme penyelesaian alternatif dalam masyarakat yang melindungi hak-hak perempuan korban. Program ini telah dimulai, proses terkini adalah diskusi-diskusi awal yang melibatkan sejumlah teolog Islam dan Kristen. *Output* yang diharapkan di akhir program nanti (akhir tahun 2008) adalah: publikasi tentang HAM perempuan dalam perspektif agama-agama bagi; konsep panduan peran masyarakat dalam pemenuhan keadilan bagi perempuan korban kekerasan; adanya konsep-konsep kebijakan keagamaan/teologi baru yang mendukung pemenuhan HAM perempuan korban kekerasan.
2. **Keterlibatan dalam forum belajar bersama antar negara/negeri muslim tentang seksualitas.** Pada tahun 2007 Komnas Perempuan memulai suatu proses belajar bersama dengan sejumlah mitra negara/negeri muslim dunia dengan topik utama seksualitas perempuan. Untuk itu, bekerjasama dengan lembaga *Women for Women's Human Rights- New Ways* berbasis di Turki, subkomisi Litbang Komnas

Perempuan telah memulai program penelitian tentang masalah seksualitas perempuan. Fokus penelitian Komnas adalah pertarungan politik di sekitar peran negara dalam mengatur seksualitas perempuan melalui RUU Anti Pornografi dalam konteks demokratisasi Indonesia.

3. **Perempuan dan Konstitusi.** Isu perempuan dan konstitusi mendapat perhatian yang sangat besar dari Komnas Perempuan. Berbagai program telah dimulai sekitar masalah itu.
  - a. Berangkat dari hasil temuan Gugus Kerja Aceh-Komnas Perempuan selama bekerja di Aceh, khususnya pasca Tsunami 2005, Komnas Perempuan memfasilitasi diskusi intensif melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Aceh maupun Jakarta tentang masalah penghukuman dan hukum cambuk di NAD.
  - b. Komnas Perempuan juga berinisiatif terlibat dalam proses uji materi UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pemohon (Sdr. H. Insa, SH). Sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung, pada bulan Juli 2007 Komnas Perempuan memberi pendapat hukumnya dengan kesimpulan akhir dan permohonan agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon/Sdr. H. Insa SH. Sebagaimana diketahui, pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memang menolak permohonan Pemohon.
  - c. Program utama Komnas Perempuan terkait tema Perempuan dan Konstitusi adalah program pemantauan perda-perda diskriminatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mitra Komnas Perempuan di lima (5) provinsi dan duabelas (12) kabupaten daerah. Kehadiran k.l. 25 kebijakan baru di 16 wilayah (provinsi hingga desa) yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan melatarbelakangi program besar ini. Program tiga tahun ini bernama "Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional", antara lain bertujuan untuk: mengembangkan dan meneruskan proses kerjasama yang konstruktif dengan lembaga-lembaga negara yang memiliki mandat memastikan konsistensi antara konstitusi, hukum nasional dan perundang-undangan daerah; memantau dan melaporkan implementasi peraturan perundangan daerah dan dampaknya terhadap pemenuhan HAM perempuan.

### **Mekanisme HAM internasional**

1. **Laporan Independen kepada Komite CEDAW.** Pada bulan Juli 2007 Komnas Perempuan mengirimkan laporan independennya kepada komite CEDAW terkait dengan pelaksanaan Konvensi CEDAW di Indonesia. Laporan independen Komnas Perempuan tentang realita Kekerasan Terhadap Perempuan dan pelanggaran HAM perempuan di Indonesia itu disusun berdasarkan kerja-kerja Komnas Perempuan. Laporan independen Komnas Perempuan meliputi pantauan dan analisis terkait aspek/masalah: Kerangka Konstitusi, Legislasi dan Kelembagaan; Kekerasan terhadap Perempuan dan Perdagangan Perempuan; Pekerjaan dan Kemiskinan; Perkawinan dan Hubungan Keluarga; ditutup dengan dorongan Komnas Perempuan agar Pemerintah RI segera meratifikasi Protokol Opsional CEDAW.
2. **Pertemuan dan submisi laporan kepada Perwakilan Sekjen PBB tentang Pembela HAM dalam kunjungan resmi ke Indonesia.** Pada bulan Juni 2007 Komnas Perempuan menerima kunjungan Perwakilan Sekjen PBB untuk Pembela

HAM, Hina Jilani. Selain menyampaikan publikasi sendiri tentang Perempuan Pembela HAM, Komnas Perempuan bekerjasama dengan sejumlah mitranya memfasilitasi pertemuan terbatas Hina Jilani dengan beberapa Perempuan Pembela HAM Aceh dan Papua di Jakarta. Dalam siaran pers tentang kunjungannya di Indonesia kemudian, Hina Jilani menyatakan apresiasinya dengan menyebut program Dukungan dan Perlindungan Pembela HAM inisiatif Komnas Perempuan sebagai satu-satunya inisiatif terkait dengan perlindungan pembela HAM di Indonesia.

3. **Pertemuan dan submisi laporan kepada Pelapor Khusus PBB Anti Penyiksaan dalam kunjungan resmi ke Indonesia.** Laporan independen Komnas Perempuan yang kedua kepada pihak PBB di tahun 2007 adalah laporan kepada Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan. Didahului pertemuan Komnas Perempuan dengan beberapa mitra internasional yang sangat menghargai kerja-kerja Komnas Perempuan dan melihat pentingnya kontribusi Komnas Perempuan, pada bulan November 2007 Komnas Perempuan menyerahkan laporan independennya kepada Pelapor Khusus PBB Anti Penyiksaan, Mr. Manfred Nowak
4. **Masukan kepada DEPLU RI tentang Komisi Perempuan ASEAN.** Dalam konteks dan kerangka pergulatan negara-negara anggota ASEAN untuk memajukan HAM perempuan, pada bulan November 2007 Komnas Perempuan memberikan masukan khusus untuk rencana pembentukan ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women (Komisi Perempuan ASEAN). Komnas Perempuan mendasarkan masukannya pada kesejarahan panjang komitmen negara-negara ASEAN untuk memajukan HAM perempuan serta merekomendasikan sebuah konsep pembentukan Komisi Perempuan ASEAN meliputi landasan hukum, kelembagaan, peran, pendekatan, keanggotaan dan alat kerjanya.
5. **Masukan bagi submisi Komnas HAM untuk *Universal Periodic Review* Indonesia oleh Dewan HAM PBB.** Pada bulan November 2007, Komnas Perempuan memberikan masukannya kepada Komnas HAM untuk partisipasi Komnas HAM dalam *Universal Periodic Review* Indonesia oleh Dewan HAM PBB di Jenewa. Masukan Komnas Perempuan didasarkan pada dua prinsip/alasan utama, bahwa: hak-hak perempuan adalah Hak Asasi Manusia; serta pentingnya upaya untuk memastikan agar kerentanan khas yang dialami oleh perempuan korban pelanggaran HAM terakomodasi secara baik dalam wacana dan praksis HAM nasional maupun internasional. Dalam masukannya kepada Komnas HAM tersebut Komnas Perempuan menggarisbawahi beberapa isu kritis terkait masalah kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan Indonesia serta upaya-upaya penanganannya, baik oleh masyarakat tetapi terutama oleh negara.
6. **Review di empat negara Asia tentang efektifitas sistem perlindungan HAM bagi perempuan buruh migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga.** Inisiatif Komnas Perempuan di tingkat regional untuk memberi perhatian khusus terhadap HAM perempuan buruh migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga sudah dimulai sejak tahun 2006 dalam pertemuan regional yang melibatkan berbagai mitra termasuk LSM dan Pelapor Khusus PBB untuk Buruh Migran, Jorge Bustamante. Salah satu mandat pertemuan regional tersebut adalah kesepakatan negara-negara peserta pertemuan untuk melakukan *review* terhadap implementasi peran dan mandat Komnas HAM dalam konteks perlindungan HAM perempuan buruh migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga; serta review sistem perlindungan HAM perempuan buruh migran tak berdokumen dan pekerja

rumahtangga. Review dimulai sejak Mei 2007 dan dilakukan di empat negara, terbagi atas dua negara pengirim buruh migran (Indonesia dan Filipina) serta dua negara penerima buruh migran (Malaysia dan Korea). Komnas Perempuan berperan sebagai kordinator seluruh proses kerjasama regional ini.

### **Peningkatan partisipasi masyarakat**

1. **Pengelolaan dan pengembangan program Pundi Perempuan.** Pundi Perempuan adalah program khusus yang dikembangkan Komnas Perempuan sebagai upaya penggalangan dana publik untuk mendukung kerja-kerja lembaga penyedia layanan atau Women's Crisis Centre di berbagai wilayah di Indonesia. Hingga tahun 2007 total dana yang berhasil dihimpun dalam program Pundi Perempuan sebesar k.l. Rp. 620.000.000,- dan selama 5 tahun belakangan ini telah dihibahkan kepada 25 lembaga pemberi layanan bagi perempuan korban kekerasan yang tersebar dari Papua hingga Sumatra. Program Pundi Perempuan adalah gagasan otentik Komnas Perempuan yang ingin memadukan filantropi dengan keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat (perempuan). Sebuah Jurnal tentang Filantropi di Jakarta mengakui Program Pundi Perempuan sebagai "*best practice*" (lihat: Galang: Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani, Vol.2 No.2 April 2007).
2. **Karya Untuk Kawan, penggalangan dana publik dalam kerjasama dengan komunitas seni.** Sejak awal digulirkannya konsep penggalangan dana publik untuk Pundi Perempuan, event utamanya adalah pameran karya seni hasil kreatif penuh nilai dan makna para perupa mitra Komnas Perempuan. Pada bulan November 2007, bekerjasama dengan kawan-kawan perupa, The Body Shop, YSIK dan mitra lainnya, untuk ketiga kalinya Komnas Perempuan melaksanakan pameran Karya Untuk Kawan (KUK) bertajuk "Menggalang Dana-Membangun Dukungan bagi Perempuan Pembela HAM". Pameran Karya Untuk Kawan ke III tahun 2007 diikuti oleh 32 orang perupa, memamerkan 53 karya dan berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 240.750.000,- yang akan disalurkan oleh YSIK kepada sejumlah lembaga penyedia layanan.
3. **Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.** Secara rutin tiap tahun Komnas Perempuan bekerjasama dengan sejumlah mitra di daerah maupun di Jakarta menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Tema kampanye tahun 2007 adalah "Menggalang Dana-Membangun Dukungan bagi Perempuan Pembela HAM". Komnas Perempuan menyediakan beragam alat kampanye, termasuk kaos tanpa krah dan stiker, serta mendistribusikannya kepada para mitra sebagai alat kampanye mereka di wilayahnya masing-masing.
4. **Kemitraan dengan pihak swasta.** Komnas Perempuan sangat menyadari pentingnya pelibatan publik, termasuk pihak swasta, dalam gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu pihak swasta mitra Komnas Perempuan adalah *The Body Shop (TBS)*, sebuah perusahaan produsen kosmetik dan alat perawatan kulit perempuan yang mengusung nilai-nilai anti kekerasan, perlindungan HAM, dll. Bersama TBS, Komnas Perempuan melaksanakan kampanye anti/penghapusan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Pada akhir tahun 2007, program kampanye ini berhasil memenangi *Milenium Development Goal Award*.

LAPORAN KELEMBAGAAN (mbak NR)

LAMPIRAN:

1. Leaflet KP
2. CATAHU 2006
3. Daftar Penerbitan terbaru Komnas Perempuan

**Daftar Penerbitan Terbaru Komnas Perempuan:**

1. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender: mendengarkan suara perempuan korban peristiwa 1965.
2. Tigabelas Pertanyaan Kunci tentang Pemulihan Makna Luas
3. Menguak misteri di balik kesakitan perempuan: Kajian dampak kekerasan terhadap status kesehatan perempuan di propinsi DKI Jakarta dan propinsi D.I. Yogyakarta.
4. Format Dokumentasi Pengalaman Kerentanan dan kekerasan terhadap perempuan pembela HAM.
5. Perempuan pembela HAM: berjuang dalam tekanan.

Jakarta, Februari 2008